

ANALISIS KESIAPAN GURU PPKN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA**Raharjo****Universitas Sebelas Maret***E-mail: raharjoppkn@staff.uns.ac.id***ABSTRAK**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 11 Februari 2022 menyampaikan rencana tindak lanjut dari peluncuran Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Peluncuran Platform Merdeka Mengajar yaitu mempersiapkan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, khususnya Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan berlaku pada tahun ajaran 2022/2023. Semua unsur atau elemen pendidikan diminta untuk turut serta mempersiapkan diri, tidak terkecuali ada adalah tenaga pendidik (guru), termasuk guru PPKn. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kesiapan guru PPKn dalam implementasi kurikulum merdeka belajar 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan melibatkan pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (atau Pendidikan Pancasila) yang sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka belajar 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kesiapan guru ppkn dalam implementasi kurikulum merdeka belum 100%, namun karena program dari sekolah harus dilaksanakan, guru berusaha untuk menyesuaikan dan beradaptasi untuk implemenyasi kurikulum merdeka 2022.

Kata Kunci: Guru PPKn, Kurikulum Merdeka.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Februari 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan rencana tindak lanjut dari peluncuran Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Peluncuran Platform Merdeka Mengajar, yaitu mempersiapkan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman

Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, khususnya Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan berlaku pada tahun ajaran 2022/2023 (Kemendikbudristek, 2022). Semua elemen atau unsur pendidikan diminta untuk mempersiapkan diri dalam rangka adanya persiapan implementasi kurikulum merdeka belajar yang rencananya akan diterapkan di sekolah penggerak pada tahun ajaran baru 2022/2023 ini. Persiapan dilakukan oleh semua komponen

sekolah termasuk guru, khususnya dalam penelitian ini ialah guru PPKn. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ialah nomenklatur mata pelajaran yang tertera pada kurikulum 2018 (Kurikulum 2013 revisi), kemudian baru-baru ini, muncul *discourse* tentang Pendidikan Pancasila yang menjadi nomenklatur baru. Adapun Pancasila akan berlaku sebagai mata pelajaran tersendiri mulai tahun ajaran baru Juli 2022. Kebijakan ini turut terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 4 tahun 2022 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Terkait Pancasila yang akan dijadikan mata pelajaran (mapel) tersendiri ini, dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sudah dijelaskan linieritas atau kualifikasi guru yang bisa mengajar mapel tersebut.

Pada prinsipnya, pertimbangan keputusan menteri nomor 56/M/2022 ini ialah tidak terlepas dari implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan yang harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, kemudian penerapan kurikulum pada masa kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus belum dapat mengatasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) sehingga perlu disempurnakan (Keputusan Mendikbudristek No 56/M/2022). Namun begitu, selain adanya pertimbangan tersebut, jika muncul perkembangan lainnya terkait substansi pelajaran, khususnya adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PP) pada satuan pendidikan dari mulai jenjang dasar sampai menengah.

Perkembangan ini tentu saja menjadi isu yang vital bagi guru PPKn, selain karena membutuhkan kejelasan kurikulum, ruang lingkup, dan tugas mengajar, tentu saja isu ini menjadi lebih menarik terkait kemudian bagaimana nasib mata pelajaran PPKn, apakah Pendidikan Pancasila (PP) ini menggantikan PPKn atau tetap ada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila (PP) di sekolah tingkat pertama dan menengah selayaknya di perguruan tinggi yang mana ada mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila (2 sks) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks). Isu ini menjadi penting untuk diteliti untuk kemudian mengetahui bagaimana respons guru PPKn dan menganalisis kesiapannya dalam implementasi kurikulum merdeka belajar 2022 ini. Guru PPKn perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri terkait bagaimana nantinya substansi isi dari Pendidikan

Pancasila (PP) ini, apakah sama dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau berbeda substansinya, atau ada anasir lainnya yang menjadi penting untuk diteliti sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana kesiapan guru PPKn dalam implementasi kurikulum merdeka belajar 2022 ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun tujuan utama dari suatu penelitian yaitu untuk memperoleh data. Dalam penelitian selain dibutuhkan metode yang tepat, perlu juga memilih teknik dan pengumpulan data yang relevan agar hasil dari penelitiannya objektif. Zuriyah (2009) menyatakan bahwa penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Bungin (2011) metode pengumpulan data merupakan bagian dari instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Penelitian

ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Wawancara dan FGD

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-deep interview*) dan forum FGD (*Focus Group Discussion*). Adapun hasil wawancara diolah menurut indeks matriks dengan rekaman, transkrip, catatan lapangan dan membaca catatan, penomoran hingga penjelasan peneliti terhadap hasil transkrip yang diperoleh.

2) Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Riduwan (2012) menjelaskan bahwa "Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna". Kuesioner atau angket dalam penelitian ini dibutuhkan untuk memperoleh data.

3) Observasi, Studi Dokumen, Studi Literatur dan Penelusuran Data *Online*

Observasi merupakan kemampuan untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja

pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Studi dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga. Dokumen dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang difungsikan sebagai data pelengkap. Studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan yang bersumber dari literatur berupa buku teks, jurnal, majalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi sangat dinamis. Pembahasan kurikulum di Indonesia ini sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan begitu dinamisnya perubahan yang terjadi dalam perkembangan kurikulum Indonesia. Alhamuddin (2014) memaparkan bahwa “Ada ungkapan menggelitik yang acapkali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni ‘ganti menteri ganti kurikulum’, nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang-kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006, 2013, 2013 revisi 2018, serta yang terbaru adalah kurikulum merdeka 2020”. (Alhamuddin, 2014). Ditambah, saat ini sudah ada pandangan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar

2022. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat (Raharjo, 2020).

Adapun kurikulum menurut Schubert (1986), ialah "*content or subject matter, curriculum as a program of planned activities, curriculum as intended learning outcomes, curriculum as cultural reproduction, curriculum as experience, curriculum as discrete task and concepts, curriculum as an agenda for social reconstruction*" (Schubert. 1986). Pandangan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya, seperti Stratemeyer, Forkner, dan McKim (194) yang menyatakan "*Curriculum currently defined in three ways; the courses and class activities in which children and youth engage; the total range of in class and out class experiences sponsored by school; and the total life experiences of the learner*" (Stratemeyer, djj, 1947). Dengan demikian, kurikulum dapat dikatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Di Indonesia, kurikulum yang pertama kali lahir ialah Kurikulum 1947 atau dikenal sebagai Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947. Dijelaskan oleh Alhamuddin (2014) bahwa “Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda *‘leer plan’* artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih populer dibanding istilah *‘curriculum’* (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan ‘Rentjana Pelajaran 1947’, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: (1) daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya; (2) garis-garis besar pengajaran”. Pada kurikulum ini, kaitannya dengan kajian bidang PPKn, dikenal istilah *civics* (kewarganegaraan). Istilah ini muncul di Kurikulum 1947 menggambarkan pelajaran sekolah yang menggambarkan pelajaran tata negara. Pada saat itu isinya hanya cara cara mendapatkan dan kehilangan

kewarganegaraan (Alhamuddin, 2014).

Kemudian perkembangan terbaru mengenai Kurikulum Merdeka Belajar yang diawali pada tahun 2020 dan berlanjut perkembangannya sampai 2022 ini, pada mulanya didasari oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti. Mendikbud di Era ini (Nadiem Makariem) menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana merdeka belajar, utamanya di Perguruan Tinggi. Menurut Nadiem, Kemendikbud menyiapkan strategi yang tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas guru. Guru tidak akan mungkin bisa digantikan teknologi. Teknologi adalah alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dikutip dari laman resmi kemendikbud.go.id, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila. Tentu saja, poin pertama terkait dengan perkembangan teknomogi, informasi, dan komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, utamanya terkait dengan PPKn, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai esensi, berupa

“keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler”. Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks lokal. “Setiap murid akan melihat semua mata pelajaran dan semua materi dalam konteks”.

Terkait dengan analisis kesiapan guru dalam implementasi kurikulum merdeka, riset yang dilakukan oleh Jamjema, dkk, (2022) menyatakan bahwa Dari analisa survei hasil asesmen mandiri tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Hanya beberapa guru yang menggunakan perangkat ajar, 2) Hanya beberapa guru yang merancang pembelajaran berbasis proyek, 3) Hanya sebagian guru yang menggunakan strategi dalam pembelajaran, 4) Sebagian gurubelum menggunakan asesmenpembelajaran, 5) Beberapa guru belum berkolaborasi dalam pembelajaran, 6) Sebagian guru belum melibatkan orang tua dan masyarakat pada kegiatan pembelajaran.

Kemudian, khususnya pada praktisi guru PPKn dalam melakukan persiapan implementasi kurikulum merdeka. Dari 10 guru PPKn yang menjadi responden dalam penelitian

ini, 7 di antaranya merasa tidak siap dengan implementasi kurikulum merdeka, dan sisanya sudah cukup siap dengan bekal dari aktivitas yang dilakukannya seperti mengikuti program sekolah penggerak dan program-program lainnya yang mendukung implementasi kurikulum merdeka.

Lebih lanjut, dalam kerangka persiapan, peneliti menemukan bahwa kecenderungan persiapan yang dilakukan guru ialah bersifat administratif dan teknis, sedangkan persiapan substansi kompetensi profesional cenderung tidak banyak. Artinya, untuk materi/substansi kajian mata pelajaran, pada tahun awal implemmtasi kurikulum merdeka ini, guru tidak begitu menyiapkan, dan lebih cenderung menggunakan bahan materi yang sudah ada, dan kurang melakukan analisis kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan materi ajar. Namun begitu, guru-guru berusaha keras untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan tugas implementasi kurikulum merdeka, baik secara teknis maupun substansi.

KESIMPULAN

Seorang guru pada prinsipnya selalu siap dan menyiapkan diri dengan segala proses perubahan yang terjadi sangat dinamis pada dunia pendidikan. Guru cenderung menerima dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam tatanan kurikulum, maupun non kurikulum. Pada prinsipnya guru merasa siap dengan berbagai perubahan baru termasuk implementasi kurikulum merdeka, namun guru merasa perlu waktu yang cukup untuk mempersiapkan

implementasi kurikulum baru agar implementasinya tidak pada tahap *trial and error* namun benar-benar implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka sesuai dengan tujuannya yaitu membentuk Profil Pelajar Pancasila.

Peneliti menyarankan kepada civitas akademika sekolah baik dari dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru, untuk terus bersinergi, bekerja sama untuk mempersiapkan dan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin. 2014. Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). Nur El-Islam, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.
- Arikunto, S., 2010, Prosedur Penelitian: Studi Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B., 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana.
- Creswell, J., W., 2016, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamjemah, D. Tomo, Erlina, A. Hartoyo, 2022, Analisis Kesiapan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Kurikulum Merdeka Di Sdn. 47 Penanjung Sekadau JPDP 8 (2) Oktober 2022, 119-127.
- Kemendikbudristek, 2022, Pelaksanaan Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, diakses di: <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/pelaksanaan-keputusan-mendikbudristek-nomor-56-m-2022-tentang-pedoman-penerapan-kurikulum-dalam-rangka-pemulihan-pembelajaran>.

- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Miles, Matthew B. & Huberman A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda Karya. Raharjo, 2020. Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. Jurnal PKn Progresif Volume 15, Nomor 1, Juni 2020.
- Riduwan, 2012, Dasar-Dasar Statistika. Cetakan ke-Sepuluh, Bandung: Alfabeta.
- Schubert. 1986. Curriculum Prespective, Paradigm, and Posibility. New York. McMillan Publishing Company.
- Stratemeyer, Florence., B, Forkner,HL., McKim, GM. 1947. Developing a Curriculum for Modern Living. Columbia: Bureau of Publication, Teacher College.
- Zuriah, N., 2009, Metode Penelitian Sosial dan pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara.